



## PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : M. HARIS AR, AP, MH  
Jabatan : KEPALA BIRO PEMERINTAHAN

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : H. ERZALDI ROSMAN  
Jabatan : GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

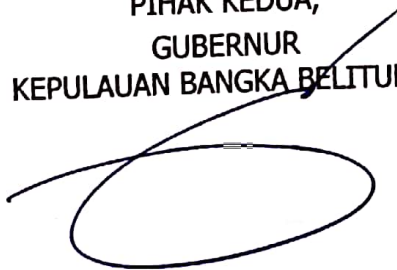
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap pencapaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Pangkalpinang, 1 Oktober 2019

PIHAK KEDUA,  
GUBERNUR  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



ERZALDI ROSMAN

PIHAK PERTAMA,  
KEPALA BIRO PEMERINTAHAN,



M. HARIS AR, A.P., M.H  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP:19760620 199502 1 001

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019**  
**BIRO PEMERINTAHAN**

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Definisi Operasional
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya kualitas dan kebijakan dibidang pemerintahan umum yang termanfaatkan	1. Persentase kebijakan administrasi kewilayahan yang termanfaatkan	70 %	Jumlah kebijakan administrasi yang termanfaatkan dibandingkan jumlah kebijakan administrasi kewilayahan yang ada X 100
		2. Persentase kebijakan otonomi daerah yang termanfaatkan		Jumlah kebijakan otonomi daerah yang termanfaatkan dibandingkan jumlah kebijakan otonomi daerah yang ada X 100
		3. Persentase kebijakan kerjasama yang termanfaatkan		Jumlah kebijakan kerjasama pemerintah daerah yang termanfaatkan dibandingkan jumlah kebijakan pemerintah daerah
2.	Meningkatnya koordinasi dibidang otonomi daerah, administrasi kewilayahan dan kerjasama yang efektif dan efisiensi.	1. Persentase koordinasi pelaksanaan otonomi daerah yang dilaksanakan	70 %	Jumlah koordinasi pelaksanaan otonomi daerah yang dilaksanakan dibandingkan jumlah koordinasi pelaksanaan otonomi daerah

**Program eselon II**

- 1 Program Peningkatan Administrasi Kewilayahan
- 2 Program Pengembangan Otonomi Daerah
- 3 Program Pengembangan Kerja Sama Pemerintah Daerah

**Anggaran**

**Keterangan**

-  
Rp 572.072.000,-  
Rp 421.048.000,-  
-  
Rp 33.575.000,-

PIHAK KEDUA,  
GUBERNUR  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

  
ERZALDI ROSMAN

Pangkalpinang, 1 Oktober 2019  
PIHAK PERTAMA,  
KEPALA BIRO PEMERINTAHAN,

  
M.HARIS AR, A.P., M.H  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP:19760620 199502 1 001